

**ANALISIS YURIDIS DAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP
KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS**

SKRIPSI

Oleh:

Ari Sapto Kuncoro

NIM. C95216094



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Sapto Kuncoro

NIM : C95216094

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Siyāsah Terhadap Kebijakan
Kenaikan Iuran Bpjs Dalam Perpres No.64 Tahun 2020
Pasca Putusan MA No.7p/Hum/2020

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Januari 2023

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a pink and orange revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI', and 'TEMPEL'. A serial number '5A545AJXD17204510' is visible at the bottom of the stamp.

Ari Sapto Kuncoro
NIM. C905216094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ari Sapto Kuncoro NIM. C95216094 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 22 Desember 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ikhsan' followed by a stylized 'F' and 'Y'.

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., M.H.

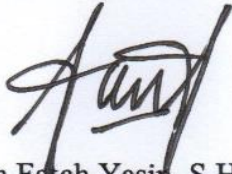
NIP 18905172015031006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ari Sapto Kuncoro, NIM: C95216094 Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji 1



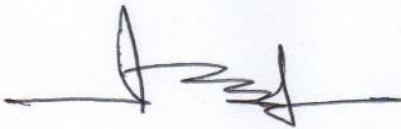
Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP : 198905172015031006

Penguji 2



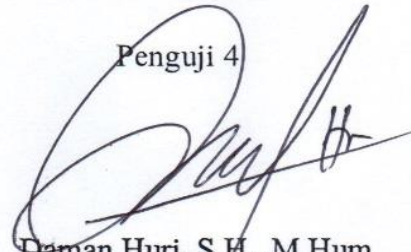
Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji 3



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 198905172015031006

Penguji 4



Daman Huri, S.H., M.Hum
NUP. 202111014

Surabaya, 10 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ari Sapto Kuncoro
NIM : C95216094
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : arisapto6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fiqih Siyāṣah Terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran Bpjs Dalam Perpres
No.64 Tahun 2020 Pasca Putusan MA No.7p/Hum/2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2025

Penulis



(Ari Sapto Kuncoro)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Analisis Fiqih Siyāsah Terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran Bpjs Dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 Pasca Putusan MA No. 7p/Hum/2020” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 Pasca Putusan MA No. 7P/HUM/2020, Bagaimana Analisis *Fiqih Siyāsah* Terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 Pasca Putusan MA No. 7P/HUM/2020.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan *statute approach*. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Kebijakan Kenaikan Iuran Bpjs Dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 Pasca Putusan MA No. 7p/Hum/2020.

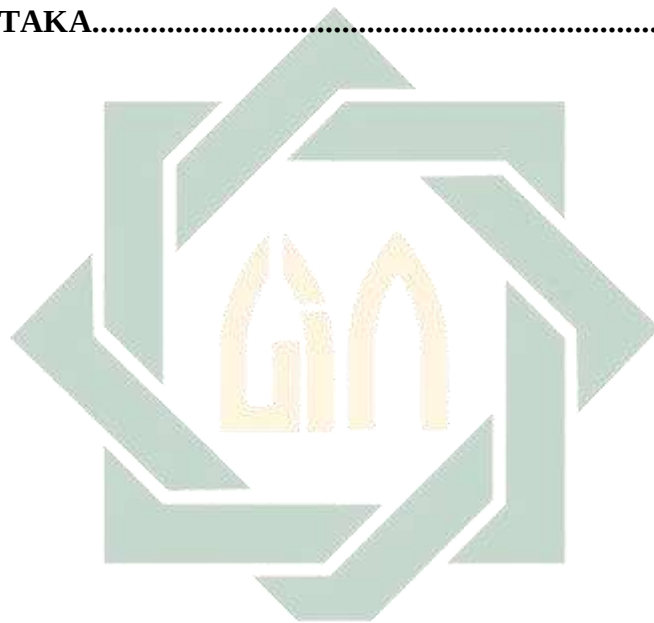
Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa terbitnya Perpres No. 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peppres No 82 tahun 2018 sejatinya tidak sejalan dan merintangi putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan pasal tentang kenaikan iuran BPJS, serta bertentangan dengan sistem *check and balances* karena pelayanan terhadap rakyat merupakan tanggung jawab utama eksekutif sehingga eksekutif dituntut untuk aktif mengurus berbagai kepentingan warga negara demi mencapai kesejahteraan yang seluas-luasnya termasuk dalam ranah kesehatan warga negaranya. Dalam prespektif fiqh Siyāsah Dusturiyah konsep kekuasaan eksekutif disebut sebagai Sultah Tanfdziyah yang dijalankan oleh khalifah. Jika khalifah bertindak sewenang-wenang maka kebijakan atau peraturan tersebut dapat digugat ke sebuah lembaga peradilan yang disebut Wilāyah al-mazalim yang memiliki kompetensi untuk menghilangkan segala bentuk kezaliman penguasa terhadap rakyatnya.

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah Butuh *political will* yang baik dari Presiden ketika hendak menerbitkan sebuah peraturan khususnya berkaitan dengan progam Jaminan kesehatan dengan memperhatikan putusan pengadilan sehingga peraturan yang lahir tidak secara nyata bertentangan dan merintangi putusan pengadilan yang sudah ada. Selanjutnya hukum dan politik harusnya berjalan secara simultan, saling mengisi dan saling melengkapi, mengingat hubungan hukum dan politik adalah interdeterminan sebab politik tanpa hukum zalim, dan hukum tanpa politik itu lumpuh sehingga segala produk perundang-undangan yang lahir akan sesuai kehendak rakyat yang berkeadilan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM FIQIH SIYASAH	18
A. Tinjauan Umum <i>Fiqih Siyasah</i>	18
B. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah</i>	22
C. Klasifikasi Mengenai <i>Fiqih Siyasah Dusturiyah</i>	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERPRES NO. 64 TAHUN 2020	31
A. Perpres No. 64 Tahun 2020 Pasca Putusan MA No. 7P/HUM/2020	31
B. Konsep Tujuan Negara	33
C. Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Presiden	37
D. Hak dan Kewajiban Presiden	45
E. Putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020	52
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN FIQIH SIYĀSAH TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS DALAM PERPRES NO 64 TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MA NO 7P/HUM/2020	54

A. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Dalam Perpres No 64 Tahun 2020 Pasca Putusan MA No 7P/HUM/2020	54
B. Analisis Fiqih Siyāsah Terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Dalam Perpres No 64 Tahun 2020 Pasca Putusan MA No 7P/HUM/2020	64
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirudin, Hasbi, *konsep negara islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1995.

Benda, Erns *pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara Negara Transformasi dengan contoh Indonesia*, Jakarta, Konrad Adenauer Stiftung, 2005.

Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djalil, Basiq H. A. *Peradilan Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.

Djazuli, H.A *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta, Kencana. 2009.

Fadli, Moh *Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2011.

Fadli, Moh, *Nondelegationdoctrine dan Peraturan delegasi di Indonesia*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011

Faisal, King Sulaiman, *Teori peraturan perundang-undangan dan aspek pengujiannya*, thafamedia, Yogyakarta, 2017.

Fajar, Mukti, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Farida, Maria Indrati, *Ilmu perundang-undangan jenis, fungsi, materimuatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2013.

Fathurahman, *Legislatif drafting, pelembagaan metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, Malang, Setara Press, 2016

Fuad, Muhammad Abdul Baqi, al-Lu'lu' wal Marjan, alih bahasa H. Salim Bahresy.

Genovese Michael dan Lori Cox Han, *The Presidency and The Challenge Of Democracy*, palgrave macmillan, New York, 2006.

HR, Ridwan, *Fiqh politik, Gagasan, Harapan , dan Kenyataa*, Yogyakarta, UII Press, 2000.

HS, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2012.

- Ibnu, Mujaer Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2000.
- Imam, al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*.
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah Konstektuaisasi doktrin politik Islam* Jakarta: prenamedia group, 2014.
- Jailani, Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya, IAIN Press, 2011.
- Kami Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Mushaf al-Fattah, Jakarta: Wali, 2016.
- Khaliq, Abdul Farid. *fiqh politik islam*, diterjemahkan Faturrahman A, Hamid, Lc, Jakarta: Amzah, 2005.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kusnardi Moh, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- Manan, Bagir *lembaga kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Manan, Bagir *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta, IND Hill CO, 1992
- Maududi, Abu al-'Ala al. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*
- Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Oesman Oetojo, *Pancasila Sebagai Ideologi*, Cet 1, Jakarta, BP 7 Pusat, 1990
- Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- sajali Munawwir, *islam dan tata negara, ajaran sejarah dan pemikiran* Jakarta; UI press, 1990
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

- Saragih Bintang R, *Susunan Kekuasaan Menurut UUD 1945*, Jakarta, Gramedia, 1989.
- Shiddieqy, Hasbi T. M. Ash. *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki
- Sirajuddin Fatkhurrohman, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang : Setara Press, 2016.
- Soekanto Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Soemantri Sri Martosoewirganjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 1992.
- Strong C. F, *Modern Political Constitution*, London : Sidgwick & Johnson,
- Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet 13, 2006.
- Suntana, Ija *model kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan islam*, Bandung, PT Reflika editama, 2007.
- Suyuthi J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Taimiyah, Ibnu, *Assiyasatus Syar'iiyyah fi Islair Ra'i war-Ra'iiyyah*; Pedoman Islam Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N, Cet, IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Tim Pengajar Ilmu Negara, FH UI, cetakan pertama, FH UI, Depok, 2004.
- Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, Jakarta, Gema Insani 2011.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika 1996.

ARTIKEL/JURNAL

- Ali, Mohammad Mahrus, *Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jurnal Konstitusi, Vol 12 No 1 , 2015.
- Nasution, Marihot, *Polemik Kenaikan Iuran BPJS di Tengah Pandemi*, Buletin APBN Vol. Ed. 11, Juni 2020.

INTERNAT/LAIN-LAIN

- KPCDI, "Dinilai Diskriminatif, KPCDI Gugat Perpres 75/2019 ke MA", <https://kpcdi.org/2019/12/06/dinilai-diskriminatif-kpcdi-gugat-perpres-75-2019-ke-ma/>, dikases pada 2 Juli 2020.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3f67e631733011311de76c17af10bc10.html>

https://www.researchgate.net/publication/338111817_PRO_DAN_KONTRA_KE_NAIKAN_BIAYA_BPJS_PER_JANUARI_2020/link/5dff93fba6fdcc28373806ad/download



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A